

Minimnya Representasi Perempuan dalam Legislatif DPR Aceh: Kajian Feminisme Terhadap *Qanun Jinayat*

Sabrina Rahmawati

ABSTRAK

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjadi persoalan penting dalam proses pembentukan kebijakan karena berpotensi menyebabkan tidak terakomodasinya kepentingan dan pengalaman perempuan dalam produk hukum yang dihasilkan. Kondisi tersebut tercermin dalam pembentukan *Qanun Jinayat* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum, khususnya ketentuan mengenai pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang berpihak kepada korban perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rendahnya representasi perempuan di parlemen Aceh terhadap pembentukan *Qanun Jinayat* serta mengkaji bagaimana keterbatasan keterlibatan perempuan dalam proses legislasi berkontribusi terhadap lahirnya ketentuan yang berpotensi diskriminatif terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-eksploratif untuk memahami secara mendalam fenomena representasi perempuan dalam proses legislasi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, risalah pembahasan *Qanun Jinayat*, laporan lembaga terkait, dan literatur akademik yang mendukung penelitian. Analisis dilakukan menggunakan teori *Politics of Presence* dari Anne Phillips yang menekankan pentingnya kehadiran kelompok yang terdampak secara langsung dalam proses pengambilan keputusan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya representasi perempuan baik secara deskriptif atau substantive mempengaruhi sehingga perspektif dan kebutuhan perempuan korban kekerasan seksual belum terakomodasi secara optimal dalam beberapa ketentuan yang diatur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya representasi perempuan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap lahirnya ketentuan-ketentuan dalam *Qanun Jinayat* yang kurang responsif gender dan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga penguatan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menjadi kebutuhan mendasar untuk mewujudkan kebijakan hukum yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci: Representasi Perempuan, *Politics of Presence*, *Qanun Jinayat* Aceh, Kekerasan Seksual, Bias Gender, Relasi Kuasa, Representasi Deskriptif, Representasi Substantif

The Underrepresentation of Women in the Aceh House of Representatives: A Feminist Analysis of the Qanun Jinayat

Sabrina Rahmawati

ABSTRACT

The low representation of women in the Aceh Regional House of Representatives (DPRA) has become a significant issue in the policymaking process, as it may result in the inadequate accommodation of women's interests and experiences within legal products. This condition is reflected in the enactment of Aceh Qanun Jinayat Number 6 of 2014, particularly its provisions concerning sexual harassment and rape, which have been criticized for not fully providing protection in favor of female victims. This study aims to analyze the impact of the low representation of women in the Aceh parliament on the formulation of the Qanun Jinayat and to examine how the limited involvement of women in the legislative process contributes to the emergence of provisions that may be discriminatory toward women. This research employs a qualitative approach with a descriptive-exploratory design to gain an in-depth understanding of women's representation in the legislative process. Data were collected through semi-structured interviews, document analysis of relevant laws and regulations, records of the Qanun Jinayat deliberation process, reports from related institutions, and supporting academic literature. The analysis is based on Anne Phillips' Politics of Presence theory, which emphasizes the importance of the direct presence of affected groups in political decision-making processes. The findings indicate that the low level of women's representation, both descriptively and substantively, has affected the extent to which the perspectives and needs of female victims of sexual violence are accommodated within several provisions of the Qanun. The study concludes that the low representation of women is one of the factors contributing to the emergence of gender-insensitive provisions in the Qanun Jinayat that may lead to discrimination against women. Therefore, strengthening women's representation in legislative institutions is essential to achieving a more just and inclusive legal framework.

Keywords: *Women's Representation, Politics of Presence, Qanun Jinayat Aceh, Sexual Violence, Gender Bias, Power Relations, Descriptive Representation, Substantive Representation.*